



PENGARUH PENGAWASAN KEPALA BIDANG FASILITAS PERHUBUNGAN TERHADAP TARGET RETRIBUSI PARKIR UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA

Oleh :

Hj. TATI HARTATI, Dra., M.Si.

ABSTRAK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir umum ditangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaannya di lapangannya dilakukan oleh Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengolahan analisis data kuantitatif melalui pendekatan statistik parametrik, alat analisis menggunakan program SPSS 19. Sedangkan parameter yang digunakan adalah variabel X yaitu metode-metode pengawasan dengan indikatornya pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif dan pengawasan teknis. Variabel Y adalah target retribusi dengan indikatornya kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Hasil pengolahan data dan uji hipotesis diperoleh nilai r (koefisien korelasi) sebesar 0,791 dengan besarpengaruh pengawasan terhadap target retribusi sebesar 62,6%. Sedangkan untuk taraf signifikansinya (t hitung) diperoleh nilai sebesar 7,769 dengan t table sebesar 2,028. Dengan demikian, t hitung $>$ t tabel, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan (X) terhadap target retribusi (Y).

Adapun dimensi pengawasan yang berkategori baik yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan administratif dan pengawasan teknis. Sedangkan dimensi pengawasan yang berkategori cukup baik adalah pengawasan langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal.

Sedangkan dimensi target retribusi yang berkategori baik yaitu dimensi kualitas dan ketepatan waktu. Sedangkan dimensi target retribusi yang berkategori cukup baik yaitu terdapat pada dimensi kuantitas.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, melahirkan suatu daerah otonom yang memiliki sejumlah kewenangan yang diserahkan kepada daerah dari tingkatan

pemerintahan yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, daerah otonom sudah tentu harus memiliki dana yang memadai. Ketersediaan dana yang dimiliki daerah otonom serta rencana penggunaannya untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dimiliki akan tercermin pada sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).



Dibutuhkan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan untuk sepenuhnya membiayai peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur. Retribusi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah Retribusi Parkir Umum.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif

parkir yaitu dengan mengawasi proses pemungutan retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah



Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia serta mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpakistan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi parkir tersebut.

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir umum ditangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan di lapangannya dilakukan

oleh Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

Manfaat retribusi parkir umum dapat diukur berdasarkan target capaian pungutan, jika target pencapaian tinggi maka manfaat retribusi terhadap PAD akan besar pula, target capaian pungutan retribusi parkir umum diartikan sebagai pencapaian maksimal dari nominal pendapatan retribusi parkir umum di Kabupaten Majalengka yang telah di tetapkan setiap tahunnya.

Untuk tercapainya target retribusi parkir umum, diperlukan semangat dan kerja keras dari para petugas sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir umum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, diperlukan juga adanya pengawasan dari Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya. Dengan begitu, pemungutan retribusi parkir umum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya target retribusi parkir umum dapat tercapai.

Hasil penjajagan yang penulis lakukan di Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka diperoleh data penerimaan retribusi parkir umum pada Tahun 2014 baru mencapai Rp. 180.000.000,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,-. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa target penerimaan retribusi parkir umum belum tercapai. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Hal ini dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih adanya petugas/pemungut retribusi belum maksimal memungut



retribusi ke semua kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

2. Masih adanya petugas/pemungut retribusi terlambat dalam menyampaikan laporan hasil kerja.
3. Masih adanya kendaraan yang sengaja menghindari petugas pemungut retribusi.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan dalam pengawasannya belum sepenuhnya menerapkan metode-metode pengawasan, diantaranya :

Diduga Kepala Bidang masih belum optimal dalam melakukan pengawasan langsung/inspeksi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir umum.

Diduga Kepala Bidang masih belum optimal dalam pengawasan formal terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir umum.

Diduga Kepala Bidang masih kurang dalam pemberian bimbingan, arahan serta teguran kepada petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir umum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
2. Bagaimana target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
3. Bagaimana pengaruh pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dasar dan penting untuk menentukan keberhasilan manajemen mencapai tujuan dengan melalui orang lain. Pengawasan dijalankan oleh tiap manajer dalam tiap tingkat manajemen dari puncak hingga ke paling bawah.

Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian pengawasan, berikut ini peneliti kemukakan beberapa pendapat mengenai pengawasan menurut para ahli dalam bidang manajemen antara lain :

George R. Terry dalam G. A. Ticoalu dengan bukunya “Prinsip-Prinsip Manajemen” mengemukakan definisi pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan (*controlling*) ialah usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja



menuju sasaran yang ingin dicapai. (2006 : 166)

Sedangkan William H. Newman yang peneliti kutip dari Soewarno Handyaningrat dalam “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” berpendapat:

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal ini menyangkut penentuan standar. Artinya membandingkan antara kenyataan dengan standar dan bila perlu mengadakan koreksi/pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana. (1994 : 21)

Selanjutnya Mc. Farland dalam Soewarno Handyaningrat di dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:

Control is a process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses di mana Pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan). (1994 : 143)

Pengawasan menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam buku “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. (1996 : 159)

Ulbert Silalahi sendiri dalam bukunya “Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi”, memberikan pengertian bahwa “Pengawasan adalah usaha yang dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan”. (2003 : 175-176)

Harold Koontz dan Cyrill O'Donnell yang dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi” menyatakan bahwa “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana”. (2003 : 175)

Sondang P. Siagian memberikan batasan pengertian pengawasan dalam bukunya “Filsafat Administrasi”, yaitu “Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. (2006 : 112)



Pariata Westra dalam “Ensiklopedi Administrasi” menyebutkan bahwa “Pengawasan atau *Control* adalah suatu pengertian yang terkandung di dalamnya aspek-aspek pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar-agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki”. (1989 : 97)

Menurut Soekarno K. dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” mengemukakan pengertian bahwa “Arti sesungguhnya dari pengawasan adalah untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan”. (2003: 96).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan bawahannya apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan serta melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan bukan mencari kesalahan orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Malayu S. P. Hasibuan dalam “Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah” mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

(2006 : 242)

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien.

Pada setiap langkah dan gerak dalam proses pengawasan perlu kiranya mempertimbangkan bentuk dan cara agar pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka macam dan prinsip pengawasan sangat menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan pengawasan. Hal ini disebabkan pengawasan dalam organisasi tidak hanya menunjuk pada satu segi dan bidang proyek yang diawasi, namun aspek yang menjadi landasan yang kuat dalam melakukan pengecekan, pengamatan serta pengevaluasian setiap langkah dan tindakan dari aparat guna tercapainya tujuan yang efektif.

Soewarno Handayani dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu



Adminstrasi dan Manajemen” mengemukakan enam metode pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung
3. Pengawasan fomal
4. Pengawasan informal
5. Pengawasan administratif
6. Pengawasan teknis

(1994 : 147)

Untuk lebih jelasnya mengenai metode pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung ialah apabila Aparat Pengawasan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan tidak langsung ialah apabila Aparat Pengawasan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.
3. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh Unit/Aparat Pengawasan yang bertindak atas nama Pimpinan Organisasinya. Dalam pengawasan

ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. Misalnya: periode waktu pemeriksaan, periode waktu pertanggungjawaban, dan periode waktu pelaporan. Aparat Pengawasan ini harus melaporkan secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Laporan itu harus disertai saran-saran perbaikan atau penyempurnaannya. Maksud laporan dari pengawasan ini agar pimpinan selalu dapat mengikuti perkembangan segala hal yang terjadi dalam organisasi.

4. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh Pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahan.
5. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi:
 - a. Pengawasan Keuangan
Pengawasan keuangan menyangkut pos-pos anggaran (Rencana Anggaran), Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi Pengurusan Administratif dan Pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.
 - b. Pengawasan Personal



Pengawasan personal menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Keanggotaan, yaitu perihal kebenaran prosedur penerimaan dan syarat-syarat menjadi peserta. Pengawasan personal di samping penilaian terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan juga menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi.

c. Pengawasan material

Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya, harganya, kuantitas dan kualitas (jumlah dan mutu), penyimpanan dan pemeliharaannya.

6. Pengawasan teknis

Pengawasan teknis ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran/satuan atau standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pengawasan teknis biasanya disertai dengan seorang ahli di bidang tersebut agar dapat mengadakan penilaian secara obyektif. Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) agar dengan jelas diketahui apakah hasil pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan sebagaimana pendapat Soewarno Handyaningrat dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif,
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed-back*)

(1994 : 149-150)

Lebih jelasnya penyusun uraikan mengenai prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi

Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi artinya bahwa pengawasan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam pelaksanaan prinsip pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi, seorang pimpinan dituntut harus mampu mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan organisasi yang dilakukan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan harus objektif,

Pengawasan harus objektif artinya bahwa pengawasan harus mampu meninjau realisasi yang ada sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat sehingga mampu menciptakan suatu hasil pengawasan yang benar dan relevan. Kondisi ini penting sekali dilakukan oleh para pimpinan



dalam mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin dan menetapkan tindakan yang tepat dengan keadaan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan prinsip pengawasan harus objektif, pimpinan dituntut memiliki dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga hasil pengawasan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Selain itu, dalam prinsip ini, seorang pimpinan juga dituntut dapat membedakan dan lebih memndahulukan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi.

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran

Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran mengandung arti bahwa pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalam pelaksanaan pengawasan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan segi manfaat dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam pelaksanaan prinsip pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran, seorang pimpinan harus memiliki ketegasan dan menjunjung tinggi nilai kebenaran serta keadilan dalam pelaksanaan pengawasannya, sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahannya dapat melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.

Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan artinya bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap setiap kegiatan organisasi yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal

dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bawahan tersebut. Karena dengan adanya pengawasan, diharapkan pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kesalahan dan penyimpangan. Kalaupun terjadi adanya kesalahan dapat dengan segera dilakukan perbaikan. Sehingga hasil dari pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien.

Pada pelaksanaan prinsip ini, pimpinan dituntut memiliki kepekaan yang tinggi sehingga pelaksanaan pekerjaan dari para bawahan berjalan dengan lancar dan mampu melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.

Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat mengandung arti bahwa pengawasan yang dilakukan harus berdasarkan standar kerja yang berlaku serta dilaksanakan dengan penuh ketelitian terhadap setiap pekerjaan atau kegiatan dari para bawahannya sehingga dari proses pengawasan tersebut mendapatkan hasil yang tepat untuk perbaikan apabila terjadi suatu kesalahan.

Dalam pelaksanaan prinsip pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat, seorang pimpinan harus memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat gejala-gejala yang akan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari para bawahannya.

6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).

Pengawasan harus bersifat terus-menerus artinya bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk satu jenis kegiatan dan untuk satu waktu saja tetapi



pengawasan berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan, sebab kegiatan organisasi akan selalu berjalan dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain.

Pada pelaksanaan prinsip pengawasan harus bersifat terus-menerus, seorang pimpinan harus dapat melakukan pengawasan secara terjadwal sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dapat berjalan sesuai dengan rencana dan apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan.

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed-back*)

Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik artinya bahwa pengawasan yang dilakukan harus dapat menghasilkan suatu dorongan bagi para pegawai untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau kegiatan dengan lebih baik lagi. Tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan akan menghasilkan kehati-hatian para pegawai sehingga pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dapat menghindari terjadinya kesalahan.

Dalam pelaksanaan prinsip ini, seorang pimpinan dituntut dapat memiliki kemampuan dalam memotivasi para pegawai sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dari para pegawai. Dengan begitu pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Yang pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.

Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pengawasan, Manullang dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen”, mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat merepleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel.
4. Dapat merepleksikan pola organisasi.
5. Ekonomi.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

(1988 : 175)

Tidak jauh berbeda, Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi”, mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus member bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-



kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.

9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*). (2003 : 178)

Dengan adanya prinsip pengawasan, pengawasan akan lebih berorientasi, berdaya guna dan berkesinambungan. Karena pada dasarnya, prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan.

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama. Tahapan-tahapan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi penyimpangan
Identifikasi penyimpangan adalah upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.
2. Membandingkan standar dengan kenyataan
Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran (standar) sesuai dengan rencana.
3. Penilaian prestasi
Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.
4. Analisis penyebab
Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi.
5. Tindakan koreksi
Tindakan koreksi diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan

prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Pengertian Target

Target mempunyai kesamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Adapun mengenai pengertian pencapaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga disebutkan sebagai berikut : “Pencapaian adalah proses, cara, perbuatan mencapai”. (2000:194)

Sedangkan pengertian target yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Balai Pustaka yaitu : “Target adalah sasaran (batas Ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai”. (1991 : 1011)

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat kesamaan makna antara target dengan sasaran. Untuk lebih jelasnya berikut penyusun kemukakan pengertian target menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Komarudin dalam bukunya “Manajemen Berdasarkan Sasaran”, mengemukakan pendapatnya bahwa “Target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti”. (1990 : 129)

Sedangkan dalam bukunya “Ensiklopedia Manajemen” Komarudin memberikan pengertian target yaitu :

- a. Target adalah tujuan yang akan dicapai : sasaran
- b. Target adalah suatu tujuan-tujuan yang lebih



terperinci yang ingin dicapai yang lazimnya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif. Target tersebut merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian yang berada dalam proses keseluruhan.

(1994:845)

Sedangkan menurut Winardi dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Modern”, mendefinisikan target sebagai berikut : “Target adalah sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan”. (1992:126)

Kemudian pengertian Target atau sasaran yang dikemukakan oleh Dharma dalam bukunya “Manajemen Prestasi Kerja” adalah sebagai berikut : “Target adalah merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara pencapaiannya”. (1985 : 38)

Dalam buku yang sama “Manajemen Prestasi Kerja”, Dharma mengemukakan kriteria-kriteria dari pencapaian target sebagai berikut :

a. Kuantitas

Merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai. Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses pelaksanaan kegiatan dimana perbandingan kesesuaian antara jumlah yang diselesaikan dengan jumlah yang ditentukan. hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah hasil kerja yang diselesaikan oleh pegawai.

b. Kualitas

Kualitas kerja adalah mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan. pengukuran kualitatif mencerminkan tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaiannya, hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran berupa keberhasilan yang dicapai yang menjadi tuntutan dalam sebuah instansi pemerintah.

c. Ketepatan waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Sedangkan ukuran-ukuran dari pencapaian target yang dikemukakan oleh Nawawi dan Martini dalam bukunya “Administrasi Personil Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja” adalah :

a. Pencapaian target sesuatu yang dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

b. Tingkat pendayagunaan dan kemamfaatan suatu hasil yang dicapai

c. Hasil kerja

(1990 : 99)

Adapun sifat-sifat yang mendukung kriteria bagi target atau sasaran yaitu sebagai berikut :

a. Sesuai dengan manfaat dan misi organisasi

b. Realistis

c. Dapat diterima masyarakat organisasi

d. Luwes terhadap resiko

e. Memberikan motivasi

f. Dipahami oleh anggota

g. Keterkaitan antar sasaran



- h. Terukur dalam pengertian waktu
- i. Spesifik

Pengertian Retribusi

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat Retribusi Daerah adalah :

1. Paksaan bersifat ekonomis
2. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar
3. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran
4. Dalam hal ini Retribusi Daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 3. Retribusi Perizinan meliputi :



- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada

masyarakat di bidang parkir, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia serta mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan parkir secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa parkir melalui retribusi parkir tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode survei, yaitu penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengambil data yang terjadi pada saat penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh antar variabel, dalam hal ini pengaruh pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan mengolah dan menganalisis data kuantitatif melalui pendekatan statistik parametrik.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari :

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti, untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebanyak 60 orang.

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam bukunya “Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi

kesalahan (error tolerance)

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian (error tolerance 10%) adalah :

$$n = \frac{60}{1 + (60 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{60}{1 + 0,6}$$

n = 37,5 dibulatkan menjadi 38 orang

Dan tekniknya menggunakan teknik *random sampling*

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah berbagai peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumentasi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan, meliputi:

1) Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan penelitian.

2) Angket

Angket digunakan sebagai instrumen pokok untuk mengumpulkan sejumlah data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Caranya dengan memberikan pertanyaan secara tertulis kepada pegawai Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai responden.

Analisis Data

Untuk mengolah data angket mengenai pengaruh pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi lembar jawaban angket
2. Klasifikasi data/angket
3. Penilaian data, yaitu jawaban para responden diberi skor dengan menggunakan sistem Skala Likert. Dalam hal ini ada lima klasifikasi jawaban yang diberikan dengan kemungkinan pemberian skor sebagai berikut:
 - a. Jawaban SS (sangat setuju) diberi nilai 5
 - b. Jawaban S (setuju) diberi nilai 4
 - c. Jawaban R (ragu-ragu) diberi nilai 3
 - d. Jawaban TS (tidak setuju) diberi nilai 2
 - e. Jawaban STS (sangat tidak setuju) diberi nilai 1

4. Tabulasi data
5. Melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas terhadap instrumen penelitian.

a. Pengujian validitas

Untuk menguji kelayakan suatu angket yang disebar pada responden, maka perlu dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan reliabilitas. Karena syarat suatu instrumen yang baik adalah valid dan reliabel. Menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 59), "Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel".

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah instrumen yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D, 2010 : 93). Untuk pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Selanjutnya nilai korelasi *product moment* hasil perhitungan dibandingkan dengan r_{tabel} , jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} berarti korelasi *product moment* untuk tiap butir pernyataan adalah valid. Untuk pengujian validitas dalam penelitian ini digunakan rumus Korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum X_i Y_i - 1/n (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{\sum X_i^2 - 1/n(\sum X_i)^2\} \{\sum Y_i^2 - 1/n(\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
 X_i = Jumlah skor item
 Y_i = Jumlah skor total
n = Jumlah responden

Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya bila $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

b. Uji reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suharsimi Arikunto (2010 : 99) menyatakan bahwa “Reliabilitas menunjukan satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya”.

Untuk menguji tingkat reliabilitas dapat digunakan rumus *alpha croanbach* yang merupakan statistik paling umum yang digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika koefisien *alpha croanbach* lebih besar atau sama dengan 0,70. Adapun koefisien *alpha croanbach* dirumuskan sebagai berikut :

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 - r_b}$$

Keterangan :

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Reliabilitas *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabilitas setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan r_i positif dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel atau handal dengan taraf

kesalahan 5%. Dari item-item yang valid dilakukan uji reliabilitas dan dianalisis menggunakan teknik tertentu yaitu dengan mengukur koefisien korelasi dengan menggunakan program SPSS 19.

c. Uji normalitas data

Untuk menguji normalitas data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, peneliti menggunakan pengujian normalitas data dengan chi kuadrat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. Dalam hal ini data pengawasan dan target retribusi parkir umum.
- Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi yang sekaligus merupakan tabel penolong untuk menghitung harga chi kuadrat.
- Menghitung frekuensi yang diharapkan (f_h) dengan cara mengalikan prosentase luas tiap bidang kurve normal dengan jumlah anggota sampel.
- Memasukkan harga-harga (f_h) ke dalam tabel kolom (f_h), sekaligus menghitung harga-harga ($f_h - f_o$) dan $(f_h - f_o)^2$. Harga adalah merupakan harga chi kuadrat.
- Membandingkan harga chi kuadrat Hitung dengan chi kuadrat tabel. Bila harga chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi kuadrat tabel ($X_h^2 < X_t^2$), maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar ($>$) dinyatakan tidak normal.

PEMBAHASAN

Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan bawahannya apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan serta melakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya. Tujuan dilakukannya pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini diperlukan data yang lengkap dari variabel-variabel yang diteliti. Dengan data itulah permasalahan dapat dijelaskan, dideskripsikan atau ditafsirkan guna diambil kesimpulan. Maka setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan Kepala Bidang terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka diperoleh data yang dibutuhkan.

Setelah angket terkumpul, selanjutnya penulis mengubah data yang bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif dengan cara memberikan skor terhadap seluruh jawaban yang tersedia. Pemberian skor tersebut berdasarkan pada skala likert yang bersifat gradasi yaitu penurunan dari tingkat skala terbesar kepada skala terkecil. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang/ sekelompok orang mengenai fenomena sosial.

Sesuai dengan jawaban yang berskala lima, maka kriteria pemberian skor berdasarkan lima tingkat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel : Pengujian validitas instrumen pengawasan

1. Jawaban sangat setuju diberi skor : 5
2. Jawaban setuju diberi skor : 4
3. Jawaban ragu-ragu diberi skor : 3
4. Jawaban tidak setuju diberi skor : 2
5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor : 1

Pengolahan Data

Pengujian instrumen bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang terkumpul telah memenuhi persyaratan dan kaidah dalam ilmu statistik. Pada penelitian ini pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas, reliabilitas dan normalitas data. Adapun hasil pengujian instrumen penelitian diuraikan sebagai berikut :

a. Pengujian validitas instrumen

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *korelasi pearson*, dan mengacu pada kaidah Barker et.al (2002) bahwa suatu pengukuran memiliki tingkat validitas yang dapat diterima adalah > 0,300. Rumus yang digunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{\sum X_i Y_i - 1/n (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{\sum X_i^2 - 1/n(\sum X_i)^2\} \{\sum Y_i^2 - 1/n(\sum Y_i)^2\}}}$$

Adapun perhitungan pengujian validitas instrumen dari variabel pengawasan menggunakan program SPSS 19, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Dimensi	Indikator	r _{hitung}	r _{kritis}	Ket.
---------	-----------	---------------------	---------------------	------

Dimensi	Indikator	r _{hitung}	r _{kritis}	Ket.
Pengawasan langsung	Inspektif	0,569	0,300	Valid
	Verifikatif	0,475	0,300	Valid
	Investigatif	0,475	0,300	Valid
Pengawasan tidak langsung	Laporan tertulis	0,708	0,300	Valid
	Ketepatan waktu penyampaian laporan tertulis	0,652	0,300	Valid
Pengawasan formal	Kunjungan pada jam kerja	0,486	0,300	Valid
Pengawasan informal	Kunjungan di luar jam kerja/silaturahmi	0,513	0,300	Valid
Pengawasan administratif	Pengawasan bidang keuangan	0,554	0,300	Valid
	Pengawasan pemahaman pegawai	0,392	0,300	Valid
	Pengawasan terhadap kelengkapan berkas	0,708	0,300	Valid
Pengawasan teknis	Pemeriksaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kerja	0,652	0,300	Valid

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r_{hitung} untuk seluruh instrument $> r_{kritis}$. Nilai r_{hitung} terendah terdapat pada indikator pengawasan administratif, pengawasan pemahaman pegawai yaitu sebesar 0,392 dan nilai r_{hitung} tertinggi terdapat pada indikator pengawasan tidak langsung, laporan tertulis dan indikator pengawasan administratif, pengawasan terhadap kelengkapan berkas yaitu sebesar 0,708.

Selanjutnya hasil pengujian validitas instrumen dari variabel target retribusi dapat dilihat sebagai berikut :

Selanjutnya hasil pengujian validitas instrumen dari variabel target retribusi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel : Pengujian validitas instrumen target retribusi

Dimensi	Indikator	r _{hitung}	r _{kritis}	Ket.
Kuantitas	Besaran jumlah penerimaan retribusi terminal sesuai dengan target yang telah ditentukan	0,710	0,300	Valid
	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang retribusi	0,632	0,300	Valid
Kualitas	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan standar dan pedoman kerja	0,632	0,300	Valid

Dimensi	Indikator	r _{hitung}	r _{kritis}	Ket.
	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku	0,735	0,300	Valid
Ketepatan Waktu	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan	0,727	0,300	Valid
	Penyampaian laporan oleh pegawai dilakukan tepat waktu	0,609	0,300	Valid

Berdasarkan tabel 5.8 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel target retribusi dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r_{hitung} untuk seluruh instrument > r_{kritis}. Nilai r_{hitung} terendah terdapat pada indikator ketepatan waktu, penyampaian laporan oleh pegawai dilakukan tepat waktu yaitu sebesar 0,609 dan nilai r_{hitung} tertinggi terdapat pada indikator kualitas, pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 0,735.

b. Pengujian reliabilitas instrumen

Pengujian reliabilitas terhadap instrument penelitian dimaksudkan agar Tabel : Pengujian reliabilitas variabel penelitian

Variabel	Alpha cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Pengawasan	0,782	0,700	Reliabel
Target retribusi	0,758	0,700	

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini seluruhnya dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai alpha cronbach untuk seluruh variabel > 0,700. Nilai alpha cronbach terendah terdapat pada

data penelitian yang didapat sudah memiliki tingkat konsistensi dan kehandalan yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai alpha cronbach, dan mengacu pada kaidah Barker et.al (2002) bahwa suatu pengukuran memiliki tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah > 0,700. Rumus yang digunakan adalah :

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 - r_b}$$

Adapun perhitungan pengujian reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk seluruh variabel menggunakan program SPSS 19, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

variabel target retribusi sebesar 0,758, dan nilai alpha cronbach tertinggi terdapat pada variabel pengawasan sebesar 0,782.

c. Pengujian normalitas data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data yang didapat telah berdistribusi normal atau tidak. Uji



normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Kaidah dalam uji *kolmogorov-smirnov*, jika nilai $p\text{-value} < 0,05$ berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak

Tabel : Hasil pengujian normalitas data

Variabel	P-Value	Nilai Kritis	Keterangan
Pengawasan	0,123	0,05	Normal
Target retribusi	0,131	0,05	

Berdasarkan tabel 5.10 di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah berdistribusi normal. Nilai dalam pengujian normalitas terendah didapat pada variabel pengawasan dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,123, dan nilai normalitas tertinggi terdapat pada variabel target retribusi dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,131.

Tabel : Kriteria penafsiran rata-rata variabel

No.	Rata-rata Skor	Penafsiran
1.	1,00 – 1,79	Sangat Kurang Baik
2.	1,80 – 2,59	Kurang Baik
3.	2,60 – 3,39	Cukup Baik
4.	3,40 – 4,19	Baik
5.	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Adapun deskripsi variabel penelitian diuraikan sebagai berikut :

a. Pengawasan

Pengawasan dibentuk oleh enam dimensi yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan

normal. Sebaliknya, jika nilai $p\text{-value} > 0,05$ berarti data tersebut telah berdistribusi normal.

Adapun perhitungan pengujian normalitas data menggunakan program SPSS 19, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara empirik dari variabel penelitian. Analisis deskripsi variabel penelitian didasarkan pada konsep dan teori yang telah diuraikan pada kajian pustaka.

Dalam analisis deskriptif penafsiran hasil perhitungan dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

formal, pengawasan informal, pengawasan administratif dan pengawasan teknis.

Adapun analisis deskripsi variabel pengawasan untuk dimensi pengawasan langsung dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan langsung

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Inspektif	f	1	11	24	2	0	38	3,29	0,611
		%	2,63	28,95	63,16	5,26	0	100		
2	Verifikatif	f	0	15	21	2	0	38	3,34	0,582
		%	0	39,48	55,26	5,26	0	100		
3	Investigatif	f	0	15	21	2	0	38	3,34	0,582
		%	0	39,48	55,26	5,26	0	100		
Total skor per kategori		f	1	41	66	6	0	114	3,32	0,592
Proporsi (%)		%	0,88	35,97	57,89	5,26	0	100		

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pengawasan dengan metode pengawasan langsung telah dilakukan dengan cukup baik oleh Kepala Bidang. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata ketiga indikator pengawasan langsung sebesar 3,32 dengan predikat cukup baik. Verifikatif dan Investigatif merupakan indikator tertinggi dalam membentuk dimensi pengawasan langsung dengan nilai 3,34 dan standar deviasi 0,582. Sedangkan indikator inspektif memiliki nilai lebih rendah dibandingkan indikator

inspektif yaitu 3,29. Hasil ini mendeskripsikan, pelaksanaan pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka walaupun dikategorikan cukup baik, namun belum optimal dalam melakukan pengawasan dengan metode inspektif kepada pegawai.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis deskriptif dimensi pengawasan tidak langsung dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan tidak langsung

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Laporan tertulis	f	1	17	19	1	0	38	3,47	0,603
		%	2,63	44,74	50	2,63	0	100		



2	Ketepatan waktu penyampaian laporan tertulis	f	1	16	19	2	0	38	3,42	0,642
		%	2,63	42,11	50	5,26	0	100		
Total skor per kategori		f	2	33	38	3	0	76	3,44	0,623
Proporsi (%)		%	2,63	43,42	50	3,95	0	100		

Berdasarkan tabel 5.13 di atas, diperoleh gambaran pelaksanaan pengawasan dengan metode pengawasan tidak langsung telah dilakukan dengan baik oleh Kepala Bidang. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata kedua indikator pengawasan tidak langsung sebesar 3,44 dengan predikat baik. Indikator laporan tertulis merupakan indikator tertinggi dalam membentuk dimensi pengawasan tidak langsung pada variabel pengawasan dengan nilai 3,47 dan standar deviasi 0,603. Hasil ini mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan tidak langsung dengan metode laporan tertulis telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, indikator ketepatan

Tabel : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan formal

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Kunjungan pada jam kerja	f	1	12	23	2	0	38	3,32	0,620
		%	2,63	31,58	60,53	5,26	0	100		

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pengawasan formal dengan indikator kunjungan pada jam kerja telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan perolehan nilai sebesar 3,32 dan standar deviasi 0,620, dengan predikat cukup baik. Hal ini mendeskripsikan bahwa Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan

waktu menyampaikan laporan tertulis memiliki nilai lebih rendah dibandingkan indikator laporan tertulis yaitu 3,42 dan standar deviasi 0,642. Hasil ini mendeskripsikan, pelaksanaan pengawasan tidak langsung Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka walaupun dikategorikan baik, namun belum optimal dalam pengawasan ketepatan waktu penyampaian laporan tertulis.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis deskriptif dimensi pengawasan formal dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka masih belum optimal dalam melakukan pengawasan formal dengan melakukan kunjungan pada jam kerja berlangsung.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis deskriptif dimensi pengawasan informal dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan informal

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Kunjungan diluar jam kerja/silaturahmi	f	1	10	24	3	0	38	3,24	0,634
		%	2,63	26,32	63,16	7,89	0	100		

Sumber : Pengolahan data, 2013

Berdasarkan tabel 5.15 di atas, diperoleh gambaran bahwa indikator dimensi pengawasan informal yaitu kunjungan diluar jam kerja/silaturahmi mempunyai nilai 3,24 dan standar deviasi 0,634. Hal ini mendeskripsikan bahwa Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Majalengka masih belum optimal dalam melakukan pengawasan informal dengan melakukan kunjungan diluar jam kerja/silaturahmi.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis deskriptif dimensi pengawasan administratif dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.16 : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan administratif

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Pengawasan bidang keuangan	f	0	17	21	0	0	38	3,45	0,504
		%	0	44,74	55,26	0	0	100		
2	Pengawasan pemahaman pegawai	f	2	23	21	2	0	38	3,66	0,669
		%	5,26	60,53	28,95	5,26	0	100		
3	Pengawasan terhadap kelengkapan berkas	f	1	17	19	1	0	38	3,47	0,603
		%	2,63	44,74	50	2,63	0	100		
Total skor per kategori		f	3	57	51	3	0	114	3,53	0,592
Proporsi (%)		%	2,63	50	44,74	2,63	0	100		

Berdasarkan tabel 5.16 di atas, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pengawasan dengan metode pengawasan administratif telah dilakukan dengan baik oleh Kepala Bidang. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata ketiga

indikator pengawasan langsung sebesar 3,53 dengan predikat baik. Pengawasan pemahaman pegawai merupakan indikator tertinggi dalam membentuk dimensi pengawasan administratif dengan nilai 3,66 dan standar deviasi 0,669. Sedangkan

indikator pengawasan bidang keuangan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan indikator pengawasan pemahaman pegawai dan pengawasan terhadap kelengkapan berkas yaitu 3,45 dan standar deviasi 0,504. Hasil ini mendeskripsikan, pelaksanaan pengawasan administratif Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Majalengka meskipun dikategorikan baik, namun belum optimal dalam melakukan pengawasan bidang keuangan.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis deskriptif dimensi pengawasan teknis dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.17 : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi pengawasan teknis

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Pemeriksaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kerja	f	1	16	19	2	0	38	3.42	0,642
		%	2,63	42,11	50	5,26	0	100		

Sumber : Pengolahan data, 2013

Berdasarkan tabel 5.17 di atas, diperoleh gambaran bahwa indikator dimensi pengawasan teknis yaitu pemeriksaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kerja mempunyai nilai 3,42 dan standar deviasi 0,642. Hasil ini mendeskripsikan bahwa Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Majalengka dalam pelaksanaan pengawasan teknis telah dilakukan dengan baik dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana kerja.

Untuk melihat hasil analisis deskripsi variabel yang dinilai berdasarkan dimensi masing-masing sebagai pembentuk variabel pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel : Rekapitulasi deskripsi variabel pengawasan

Dimensi	Nilai rata-rata	St-dev	Keterangan
Pengawasan langsung	3,32	0,592	Cukup Baik
Pengawasan tidak langsung	3,44	0,623	Baik
Pengawasan formal	3,32	0,620	Cukup Baik
Pengawasan informal	3,24	0,634	Cukup Baik
Pengawasan administratif	3,53	0,592	Baik
Pengawasan teknis	3,42	0,642	Baik
Variabel pengawasan	3,38	0,617	Cukup Baik

Sumber : Pengolahan data, 2013

Dari tabel 5.18 di atas, diketahui variabel pengawasan yang dibentuk oleh enam dimensi yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, dan pengawasan administratif dikategorikan cukup baik. Hal ini didasarkan dari nilai rata-rata kumulatif yang diperoleh sebesar 3,38 dengan kategori cukup baik. Namun jika dianalisis berdasarkan dimensi, nilai rata-rata dimensi berada di antara 3,24 sampai dengan 3,53, sehingga jawaban responden berkisar dari cukup baik sampai dengan baik. Berdasarkan tabel 4.18 tersebut terdapat tiga dimensi yang memiliki nilai yang rendah dan berkategori cukup baik yaitu dimensi pengawasan langsung, dengan nilai 3,32, dimensi pengawasan formal dengan nilai

3,32, dan dimensi pengawasan informal dengan nilai 3,24. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa dimensi pengawasan langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal tersebut belum sepenuhnya dicapai secara optimal.

b. Target retribusi

Variabel target retribusi didasarkan pada indikator dan dimensi yang diperoleh dari kajian teoretis yang relevan dengan topik penelitian. Variabel target retribusi yang relevan dan berkaitan dengan dibentuk oleh tiga dimensi yaitu dimensi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.

Adapun analisis deskripsi variabel target retribusi dimensi kuantitas diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.19 : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi kuantitas

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Besaran jumlah penerimaan retribusi terminal sesuai dengan target yang telah ditentukan	f	1	10	25	2	0	38	3,26	0,601
		%	2,63	26,32	65,79	5,26	0	100		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang retribusi	f	0	13	23	2	0	38	3,29	0,565
		%	0	34,21	60,53	5,26	0	100		
Total skor per kategori		f	1	23	48	4	0	76	3,27	0,583
Proporsi (%)		%	1,32	30,26	63,16	5,26	0	100		

Sumber : Pengolahan data, 2013

Berdasarkan tabel 5.19 di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum

penilaian responden terhadap dimensi kuantitas adalah cukup baik yang dilihat

dari nilai rata-rata 3,27 dan standar deviasi 0,583. Hal ini mendeskripsikan bahwa target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka masih belum tercapai secara optimal dilihat dari besaran jumlah penerimaan retribusi parkir umum

masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan dan tingkat kesadaran masyarakat tentang retribusi.

Selanjutnya, untuk mengetahui analisis deskripsi variabel target retribusi dimensi kualitas diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.20 : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi kualitas

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan standar dan pedoman kerja	f	1	24	12	1	0	38	3,66	0,582
		%	2,63	63,16	31,58	2,63	0	100		
2	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku	f	3	14	19	2	0	38	3,47	0,725
		%	7,89	36,84	50	5,26	0	100		
Total skor per kategori		f	4	38	31	3	0	76	3,56	0,653
Proporsi (%)		%	5,26	50	40,79	3,95	0	100		

Sumber : Pengolahan data, 2013

Berdasarkan tabel 5.20 di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum penilaian responden terhadap dimensi kualitas adalah baik, yang dilihat dari nilai rata-rata 3,56 dan standar deviasi 0,653. Nilai tertinggi terdapat pada indikator pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan standar dan pedoman kerja dengan nilai 3,66 dan standar deviasi 0,582. Hasil ini mendeskripsikan bahwa target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sudah baik dilihat dari pelaksanaan penarikan retribusi parkir umum.

Selain itu, terdapat pula indikator yang nilainya terendah yaitu pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan nilai 3,47 dan standar deviasi 0,725. Hasil ini mendeskripsikan bahwa meskipun target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat dikategorikan baik namun belum optimal dilihat dari pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk mengetahui analisis deskripsi variabel target

retribusi dimensi ketepatan waktu diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.21 : Distribusi tanggapan responden terhadap dimensi ketepatan waktu

No	Pertanyaan		5	4	3	2	1	Total	Mean	St.dev
1	Pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan	F	1	14	22	1	0	38	3,39	0,595
		%	2,63	36,84	57,89	2,63	0	100		
2	Penyampaian laporan oleh pegawai dilakukan tepat waktu	F	2	14	20	2	0	38	3,42	0,683
		%	5,26	36,84	52,64	5,26	0	100		
Total skor per kategori		F	3	28	42	3	0	76	3,40	0,639
Proporsi (%)		%	3,95	36,84	55,26	3,95	0	100		

Sumber : Pengolahan data, 2013

Berdasarkan tabel 5.21 di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum penilaian responden terhadap dimensi ketepatan waktu adalah baik, yang dilihat dari nilai rata-rata 3,40 dan standar deviasi 0,639. Nilai tertinggi terdapat pada indikator penyampaian laporan oleh pegawai dilakukan tepat waktu dengan nilai 3,42 dan standar deviasi 0,683. Hasil ini mendeskripsikan bahwa target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sudah baik yang ditunjukkan dalam penyampaian laporan oleh pegawai dilakukan tepat waktu.

Selain itu, terdapat pula indikator yang nilainya terendah yaitu pelaksanaan

penarikan retribusi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan nilai 3,39 dan standar deviasi 0,595. Hasil ini mendeskripsikan bahwa meskipun target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dikategorikan baik namun belum optimal dalam pelaksanaan penarikan retribusi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk menganalisis rekapitulasi variabel target retribusi yang dinilai berdasarkan dimensi masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.22 : Rekapitulasi deskripsi variabel target retribusi

Dimensi	Nilai rata-rata	St-dev	Keterangan
Kuantitas	3,27	0,583	Cukup Baik
Kualitas	3,56	0,653	Baik
Ketepatan waktu	3,40	0,639	Baik
Variabel target retribusi	3,41	0,625	Baik

Sumber : Pengolahan data, 2013

Analisis Verifikatif Penelitian

Dari serangkaian kegiatan penelitian, tahapan paling akhir dari suatu penelitian adalah pengujian hipotesis yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan, yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan diindikasikan baik.
2. Target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka diindikasikan baik.
3. Pengawasan oleh Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Adapun alat pengujian yang digunakan adalah pendekatan statistik parametrik dengan menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* untuk

mengetahui seberapa besar kuat lemahnya hubungan antara pengawasan (variabel X) dengan target retribusi (variabel Y). Rumus yang digunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Sedangkan pengujian yang kedua adalah pengujian regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar nilai target retribusi (variabel Y) apabila nilai pengawasan (variabel X) naik satu satuan. Rumus yang digunakan adalah :

$$Y' = a + bX$$

Adapun perhitungannya untuk pengujian koefisien korelasi dari variabel pengawasan target retribusi serta pengujian regresi sederhana menggunakan program SPSS 19, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23 : Korelasi antar variabel pengawasan dan target retribusi

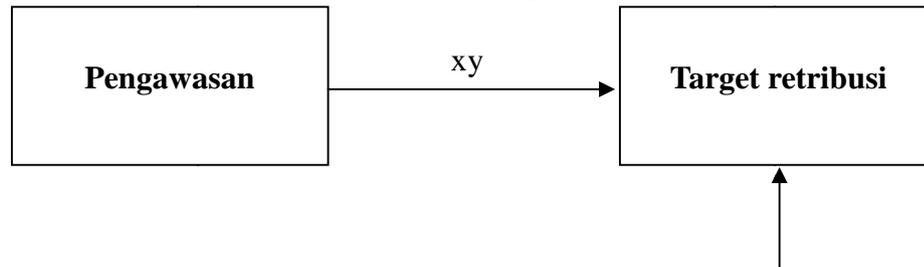
Correlations

		PENGAWASAN	TARGET
PENGAWASAN	Pearson Correlation	1	.791**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	38	38
TARGET	Pearson Correlation	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	

N	38	38
---	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis pengaruh pengawasan terhadap target retribusi berdasarkan analisis jalur (*path analysis*), dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 5.2 Analisis terhadap struktur jalur
Sumber : Pengolahan data 2013

Tabel 5.24 : Regresi linear variabel pengawasan dan target retribusi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENGAWASAN ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: TARGET

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.791 ^a	.626	.616	1.570

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.761	1	148.761	60.350	.000 ^a
	Residual	88.739	36	2.465		
	Total	237.500	37			

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN

b. Dependent Variable: TARGET

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.547	2.581		.212	.833
PENGAWASA	.533	.069	.791	7.769	.000
N					

a. Dependent Variable: TARGET

Sumber : Pengolahan data 2013 dengan SPSS 19 for Windows

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa koefisien korelasi pengawasan terhadap target retribusi adalah sebesar 0,791. Hal tersebut berarti pengawasan memiliki pengaruh sebesar 62,6% terhadap target retribusi. Dengan demikian pengawasan dapat dinyatakan sebagai variabel *intervening* atau sebagai *driven* dari meningkatnya target retribusi.

Besarnya sisa pengaruh dari pengawasan terhadap target retribusi adalah sebesar 37,4%, yang disebabkan dari faktor luar yang tidak termasuk objek penelitian.

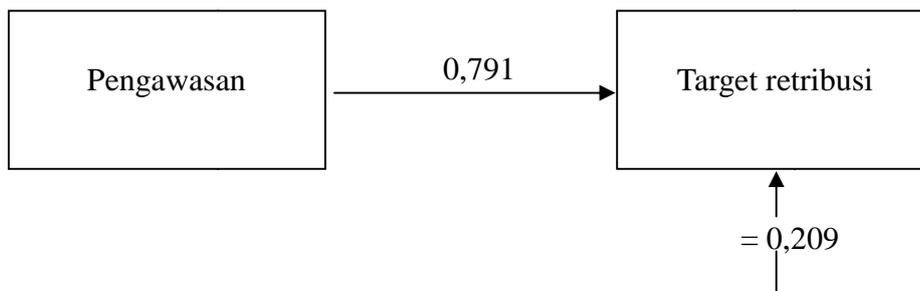
Berdasarkan tabel tersebut di atas diperoleh besarnya nilai koefisien untuk persamaan :

$$Z_{\text{Target retribusi}} = Z_{\text{Pengawasan}} +$$

Sehingga persamaan struktur jalur tersebut menjadi :

$$Z_{\text{Target retribusi}} = 0,791 Z_{\text{Pengawasan}}$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diprediksi bahwa setiap perubahan 1 satuan pada pengawasan akan mengubah target retribusi sebesar 0,791 dan dapat digambarkan pada bagan *path analysis* sebagai berikut :



Uji Hipotesis

Berdasarkan pengolahan dan analisis data di atas, pengaruh variabel pengawasan (X) terhadap target

retribusi(Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka untuk mengujinya menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut :

- $H_0 : \rho_{xy} = 0$ Tidak terdapat pengaruh pengawasan terhadap target retribusi
- $H_1 : \rho_{xy} \neq 0$ Terdapat pengaruh pengawasan terhadap target retribusi

Tabel 5.25 : Pengujian variabel pengawasan (X) terhadap target retribusi (Y)

Struktural	Koefisien	t -hitung	t- tabel	P-value	Kesimpulan
------------	-----------	-----------	----------	---------	------------



	korelasi				
XY	0,791	7,769	2,028	0,000	H ₀ di tolak, H ₁ Diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara X terhadap Y

Sumber : Pengolahan data, 2013

Untuk koefisien korelasi $XY = 0,801$, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,769 dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai $t_{tabel} = 2,028$, dikarenakan $t_{hitung} = 7,769 > t_{tabel} = 2,028$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan (X) terhadap target retribusi (Y).

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pembahasan deskriptif

Tabel 5.26 : Rekapitulasi analisis deskriptif variabel penelitian

Variabel	Nilai Rata-Rata	St. Deviasi	Kategorisasi
Pengawasan	3,38	0,617	Cukup Baik
Target retribusi	3,41	0,625	Baik

Sumber : Pengolahan data, 2013

a. Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

Pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan organisasi untuk pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka khususnya dalam upaya meningkatkan target retribusi parkir umum.

dan pembahasan verifikatif. Pembahasan deskriptif dikaji berdasarkan hasil analisis yang menggunakan perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi dan rentang nilai, sedangkan pembahasan verifikatif dikaji berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*) dan pengujian hipotesis.

5.3.1 Pembahasan Deskriptif

Pembahasan deskriptif variabel penelitian diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.26 : Rekapitulasi analisis deskriptif variabel penelitian

Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa pengawasan dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,38. Dari enam dimensi yang membentuk pengawasan, terdapat tiga dimensi yang dikategorikan baik yaitu dimensi pengawasan tidak langsung, pengawasan administratif dan pengawasan teknis.

Namun demikian, dimensi lainnya yaitu dimensi pengawasan langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal belum sepenuhnya diterapkan

dalam pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang. Sehingga Kepala UPTD dituntut lebih mengoptimalkan pengawasannya dengan melakukan inspeksi, verifikasi dan investigatif serta kunjungan pada jam kerja maupun diluar jam kerja/silaturahmi, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai khususnya dalam penarikan retribusi parkir umum dapat berjalan sesuai dengan rencana serta mencapai target retribusi yang telah ditetapkan.

b. Target retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

Hasil analisis membuktikan bahwa nilai rata-rata dimensi target retribusi sebesar 3,41, sehingga target retribusi dapat dikategorikan baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa target retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dinilai baik dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan dimensi kualitas dan ketepatan waktu.

Meskipun dikategorikan baik, dari ketiga dimensi target retribusi terdapat satu dimensi yang mendapat nilai dengan kategori cukup baik yaitu dimensi kuantitas. Hal ini membuktikan bahwa target retribusi parkir umum pada Dinas

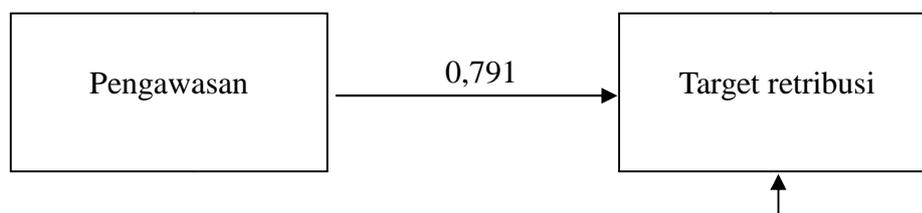
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka belum tercapai dan perlu adanya upaya dan pengawasan dari Kepala Bidang sehingga dapat mencapai target retribusi parkir umum yang telah ditetapkan.

5.3.2 Pembahasan Verifikatif

Pembahasan verifikasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel, sehingga dapat memberikan posisi bahwa penelitian yang dilakukan saat ini apakah mendukung, menjawab atau bahkan menolak teori. Adapun pembahasan verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengawasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap target retribusi. Hasil ini memberikan makna bahwa peran pengawasan menjadi faktor penting dalam setiap kegiatan pada sebuah organisasi terutama dalam upaya mencapai target retribusi parkir umum. Temuan secara empiris menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung dari pengawasan terhadap target retribusi parkir umum memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan yang cukup kuat antara target retribusi dengan pengawasan.

Berdasarkan hasil pembahasan verifikasi, maka dapat diilustrasikan simpulan sebagai berikut :



Gambar 5.4 Simpulan hasil pembahasan verifikasi



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tentang pengaruh pengawasan oleh Kepala Bidang terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Bidang dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh perolehan nilai rata-rata penilaian responden sebesar 3,38 dengan standar deviasi 0,617 dengan predikat cukup baik.
2. Dimensi pengawasan yang berkategori baik yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan administrasi dan pengawasan teknis. Sedangkan dimensi pengawasan yang berkategori cukup baik adalah pengawasan langsung, pengawasan formal dan pengawasan informal.
3. Target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan oleh perolehan nilai rata-rata penilaian responden sebesar 3,41 dengan standar deviasi 0,625 dengan predikat baik.
4. Dimensi target retribusi yang berkategori baik yaitu dimesni kualitas dan ketepatan waktu. Sedangkan dimensi target retribusi yang berkategori cukup baik yaitu terdapat pada dimensi kuantitas.
5. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap target retribusi parkir umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien korelasi sebesar 0,791 dengan besar pengaruh pengawasan terhadap target retribusi sebesar 62,6%. Serta nilai taraf signifikan (t) sebesar 7,769, dimana t hitung lebih besar dari t tabel.